



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT**



Graha Mandiri Lantai 5, Jl. Imam Bonjol 61, Jakarta 10310, Indonesia  
P : 021-39832091 | E : bpdpsawit@bpdp.or.id | W : www.bpdp.or.id

## **PRESS RELEASE**

Untuk segera diterbitkan  
3 September 2020

### **Menekan Penyebaran Covid-19 Melalui Kegiatan Launching dan Penyerahan Hand Sanitizer dan Hand Soap Berbahan Utama Sawit**

JAKARTA—Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bekerja sama dengan Surfactant and Bioenergy Research Center (SBRC) LPPM Institut Pertanian Bogor (IPB) meluncurkan produk sabun tangan cair dan penyanitasi tangan (hand sanitizer) yang dibuat dari produk kelapa sawit.

Peluncuran dilangsungkan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo, Kementerian Keuangan (Gedung eks MA), Jakarta, Jumat, 4 September 2020, ditandai dengan penyerahan produk sabun cair dan hand sanitizer oleh Dirjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto kepada perwakilan Badan Layanan Umum (BLU) bidang kesehatan.

Sabun cair untuk cuci tangan dan hand sanitizer yang terbuat dari sawit (gliserol) ini dikembangkan oleh SBRC IPB dengan dukungan BPDPKS dan diproduksi secara massal oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Keterlibatan UKM ini sejalan dengan program strategis BPDPKS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami berharap agar keterlibatan UMKM ini menjadi bagian dalam upaya kita untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam sambutannya.

Produksi sabun cair dan hand sanitizer tersebut merupakan upaya BPDPKS untuk membantu masyarakat dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Saat ini, telah diproduksi sebanyak 12.500 sabun cuci tangan cair dan 12.500 hand sanitizer berbahan baku sawit. Untuk sementara ini, produk tersebut disalurkan kepada BLU bidang kesehatan, antara lain sejumlah rumah sakit di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat.

“Tentunya kegiatan ini tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan berupaya untuk terus melanjutkan dan meningkatkannya,” tegas Eddy.

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu Andin Hadiyanto menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengenai langkah-langkah yang cepat, fokus, terpadu dan sinergi dalam rangka penanganan Covid-19. Terkait Inpres tersebut, Kemenkeu sebelumnya telah menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-45/MK.5/2020 tanggal 27

Maret 2020 yang meminta seluruh BLU untuk segera berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah yang berkonsentrasi pada kesehatan masyarakat, penguatan jaring pengaman sosial dan mendorong keberlangsungan aktivitas bisnis/ekonomi.

"Kegiatan yang kita lakukan pada siang ini, adalah merupakan salah satu dari implementasi kebijakan di atas, di mana kita dapat menghasilkan produk kesehatan yang dihasilkan dari salah satu kekayaan alam kita, melalui penggunaan teknologi yang dihasilkan oleh anak bangsa kita sendiri dan melibatkan kegiatan ekonomi rakyat melalui Usaha Kecil Menengah," tutur Andin dalam sambutannya.

Andin berharap pengadaan produk kesehatan dari sawit ini bisa dilanjutkan dan ditingkatkan sebagaimana yang diamanatkan oleh Presiden RI. Sebelumnya, dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 14 Agustus 2020, Presiden Joko Widodo meminta untuk tidak menyia-nyaiakan pelajaran yang diberikan oleh krisis. "Jangan biarkan krisis membuahakan kemunduran. Justru momentum krisis ini harus kita bajak untuk melakukan lompatan kemajuan," ujar Presiden.

"Dalam konteks Badan Layanan Umum, arahan Presiden tersebut kita laksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang lebih tepat, cepat, kolaboratif dan sinergi antar BLU melalui proses kerja yang cerdas, tidak berbelit dan mengoptimalkan teknologi yang tersedia," tegas Andin. \*\*

### **Sekilas Tentang BDPKKS**

BDPKKS merupakan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

BDPKKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan komite pengarah dengan memperhatikan program pemerintah. Adapun komite pengarah dimaksud terdiri dari 8 (delapan) kementerian, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berbagai program yang dilakukan BDPKKS, di antaranya ialah **Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit, Program Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit, Program Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Promosi, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).** \*\*\*